



LMCK

Laporan Monitoring Capaian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

TAHUN
2023

• Triwulan ke-II •



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si.	1. Penyusun Rencana dan Pelaporan	14-7-2023	X
		2. Dina Safitri, S.H.	2. Pengadministrasi Perkantoran	14-7-2023	g
2.	Diperiksa	Herry Wanda, S.Sos., M.A.P	Kepala Subbagian Tata Usaha	17-7-2023	g
3.	Disetujui	Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T	Kepala Balai	17-7-2023	35



Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Adapun isi dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja tersebut mencakup Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan terutama dalam pencapaian Tahun 2023.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 11 Juli 2023

Kepala Balai



Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T
NIP. 19790220 200112 1 001



Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 Triwulan II yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 19 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 Triwulan II, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi telah melaksanakan dengan baik, 8 (empat) Indikator Kinerja kurang dari 100% ($0\% \leq IK < 100\%$), dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah hampir terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2.1. Bagan Struktur Organisasi	5
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	7
I.5. Sistematika Laporan.....	7
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	13
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	25
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	25
2.2.1 SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	32
IKK 1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	33
IKK 2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	36
IKK 3 Jumlah Terminal Tipe A & Terminal Barang yang beroperasi	36
IKK 4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	39
IKK 5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Penyeberangan	39
IKK 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	40
2.2.2 SK 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	43
IKK 7 Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	43
IKK 8 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	46
IKK 9 Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP	46
2.2.3 SK 4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	49
IKK 10 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	50
IKK 11 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	52
IKK 12 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass, dan batas kecepatan	55
IKK 13 Jumlah ketersediaan taman edukatif	55
IKK 14 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	56
IKK 15 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	58



IKK 16 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan Bermotor	59
IKK 17 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.....	62
2.2.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	63
IKK 18 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi Darat	64
2.2.5 SK 1 Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan Akuntabel	66
IKK 19 Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan Darat	66
II.3. Realisasi Anggaran	69
BAB III PENUTUP	
III.1 Ringkasan Capaian	79
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	81
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023	
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023	
4. Rencana Aksi Tahun 2023	
5. Monitoring Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2023	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Sumber Daya Manusia BPTD Wilayah V Prpvinsi Jambi	6
Tabel I.2.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.....	13
Tabel I.3.	Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023.....	16
Tabel I.4.	Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023	19
Tabel I.5.	Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023.....	23
Tabel II.1.	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.....	28
Tabel II.2.	Rincian Per Sumber Dana Pagu Tahun 2023 per Triwulan II	69
Tabel II.3.	Rincian Per Jenis Belanja Pagu Tahun 2023 per Triwulan II	69
Tabel II.4.	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan II	71
Tabel II.5.	Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan II	71
Tabel II.6.	Rincian Realokasi Per Sumber dana dan per Jenis Belanja Triwulan II	72
Tabel II.7.	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan per kegiatan Triwulan II	73
Tabel II.8.	Rincian Perbandingan pagu dan realisasi Tahun 2020-2023 Per Triwulan II.....	74
Tabel II.9.	Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA Tahun 2023 Per Triwulan II	74
Tabel II.10.	Realisasi Anggaran Per Jenis belanja Tahun 2023 Per Triwulan II.....	75
Tabel II.11.	Realisasi Anggaran Per Sumber dana Tahun 2023	75
Tabel II.12.	Tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM	77
Tabel III.1.	Tabel Hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penangung jawab	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 1	34
Gambar II.2.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 3	37
Gambar II.3.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 6	41
Gambar II.4.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 7	44
Gambar II.5.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 9	47
Gambar II.6.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 10	50
Gambar II.7.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 11	53
Gambar II.8.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 14	57
Gambar II.9.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 16	60
Gambar II.10.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 17	62
Gambar II.11.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 18	64
Gambar II.12.	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 19	66



DAFTAR LAMPIRAN

6. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
8. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
9. Rencana Aksi Tahun 2023
10. Monitoring Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2023



BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat telah terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi menjadi Balai Pengelola Transportasi

Darat Kelas II Jambi. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan

perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



ORGANISASI BPTD KELAS II JAMBI



Kepala BPTD Kelas II Jambi
Eko Indra Yanto, S.SiT., MT



Subbag Tata Usaha
Herry Wanda, S.Sos., M.A.P



Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Yuliana Y. S. Panjaitan, S.SiT., MM



Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Harwinanto, S.E., M.T



Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
Yuliansyah, S.SiT., MM

Satuan Pelayanan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pengawas Satpel Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi



Pengawas Satpel Terminal Tipe A Sribulan Kab. Sarolangun



Pengawas Satpel Terminal Tipe A Muara Bungo Kab. Bungo



Pengawas Satpel Terminal Tipe A Bangko Kab. Merangin

Pengawas Satpel UPPKB Jambi Merlung Kab. Muaro Jambi



Pengawas Satpel UPPKB Muara Tembesi Kab. Batanghari



Pengawas Satpel UPPKB Pelawan Sarolangun Kab. Sarolangun



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II adalah sebanyak 323 orang dengan rincian 153 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 170 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TOTAL
		PNS	PPNPN	
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II JAMBI	47	34	81
2	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	11	30	41
3	TERMINAL TIPE A BUNGO	12	22	34
4	TERMINAL TIPE A BANGKO	11	20	31
5	TERMINAL TIPE A SAROLANGUN	10	15	25
6	UPPKB JAMBI MERLUNG	16	25	41
7	UPPKB PELAWAN SAROLANGUN	19	6	25
8	UPPKB MUARA TEMBESI	27	12	39
9	UPPKB KERINCI KOTA SUNGAI PENUH		1	1
10	WILKER PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL		5	5
JUMLAH		153	170	323
11. PENGAMANAN KHUSUS				
- KANTOR INDUK		2		
JUMLAH		2		



I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu disusun program kerja, melalui program kerja akan terlihat tahapan-tahapan yang dilakukan serta dukungan materi atau bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan program kerja/ kegiatan ini ada beberapa persyaratan/ kriteria yang perlu dipenuhi. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

- 1) Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 2) Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
- 3) Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.3.1. SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - II.3.1.1 IKK 1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023



a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.2 IKK 2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.3 IKK 3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.4 IKK 4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.5 IKK 5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.6 IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.2. SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.3.2.1 IKK 7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.2.2 IKK 8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.2.3 IKK 9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3. SK. 4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat

II.3.3.1 IKK 10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.2 IKK 11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan



- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.3 IKK 12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.4 IKK 13. Jumlah ketersediaan taman edukatif

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.5 IKK 14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.6 IKK 15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE)*

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.7 IKK 16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.8 IKK 17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.4 SK. 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.3.4.1 IKK 18. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.5 SK. 1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.3.5.1 IKK 19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran



2. Refocusing Anggaran Tahun 2023
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2023
- II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023
1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023
 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023
 4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (table perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
 3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

- III.1 Penutup
 - III.1.1 Ringkasan Capaian
- III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Rencana Aksi Tahun 2023
5. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023
6. Lain-lain yang dianggap perlu

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sampai saat ini masih mengacu dan menggunakan Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dikarenakan sampai saat ini belum adanya Revisi Rencana Strategis dengan Nomenklatur terbaru di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR				
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional	Lokasi	5	5



		terlayani subsidi angkutan antarmoda				
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	7	7
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan	%	80	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	100
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	2	0
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	30	50
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	1
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	2000
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan	unit	-	-



			bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*			
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	50	250
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
WA			PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perkantoran Ditjen Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perhubungan Darat	Nilai	80	90



I.6.1 Uraian / Narasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan sampai dengan Triwulan II masih mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dengan nomenklatur lama yaitu Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi dikarenakan belum dilaksanakan revisi dengan nomenklatur terbaru pada Perjanjian Kinerja dan dokumen SAKIP lainnya sampai dengan perubahan DIPA dengan nomenklatur terbaru.

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0



		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70



SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II masih mengacu pada Perjanjian Kinerja awal dan Revisi I Perjanjian Kinerja dengan nomenklatur lama. Revisi Perjanjian Kinerja dengan nomenklatur terbaru belum dapat dilakukan perubahan sampai dengan perubahan DIPA dengan nomenklatur terbaru.

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V
Provinsi Jambi Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80



		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.985.836.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 48.351.251.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.902.143.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

ANGGARAN

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dilakukan pada bulan Mei Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan target pada Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yang semula memiliki target 100% menjadi 0% dikarenakan tidak ada pelaksanaan kegiatan pada Indikator Kinerja Kegiatan tersebut pada Tahun ini.
2. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi yang semula memiliki target 6 Lokasi menjadi 10 Lokasi, penambahan 4 Lokasi tersebut dikarenakan dimasukkan kegiatan 4 Pembangunan Halte Sungai pada Tahun ini.

Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 101.642.747.000,- adalah sebagai berikut:



Tabel I.5 Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Mei 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN**ANGGARAN**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 14.985.836.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 9.760.540.000 |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 48.633.241.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 4.143.720.000 |
| 5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp. 583.680.000 |
| 6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 5.902.143.000 |
| 7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 17.633.587.000 |

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Mei 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



BAB II

Akuntabilitas Kinerja



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.



Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:



1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

**Tabel II. 1** Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Jambi Triwulan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi														
IKK 1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	27	27%	100	50,04	50,04%						
IKK 2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%						
IKK 3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%						
IKK 4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%						
IKK 5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%	0	0	100%						



IKK 6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	6	6	100%	10	6	60%						
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan transportasi darat														
IKK 7	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	95	95	95	100%	95	95	100%						
IKK 8	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	%	0	0	0	100%	0	0	100%						
IKK 9	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	100	100	100%						
SK3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat														
IKK 10	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	24	30%	80	56	70%						
IKK 11	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1	0	0%	1	1	100%						



IKK 12	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%						
IKK 13	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%						
IKK 14	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	0	0	0%	0	0	0%						
IKK 15	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	100%	0	0	100%						
IKK 16	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	20	20%	80	42	52,5%						
IKK 17	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70	70	0	0%	70	46	65,71%						



SK4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat														
IKK 18	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	87	20	20%	87	50	57,47%						
SK5	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel														
IKK 19	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88	88	20	20%	88	61,6	70%						
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan															
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan															
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK$\geq$100%)					11			11							
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%$\leq$IKK<100%)					8			8							

Selama tahun 2023, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 19 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda
3. IKK 3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
4. IKK 4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
5. IKK 5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
6. IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi



2.2.1.1. IKK 1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi RIT}}{\text{Target RIT}} \times 100\%$$

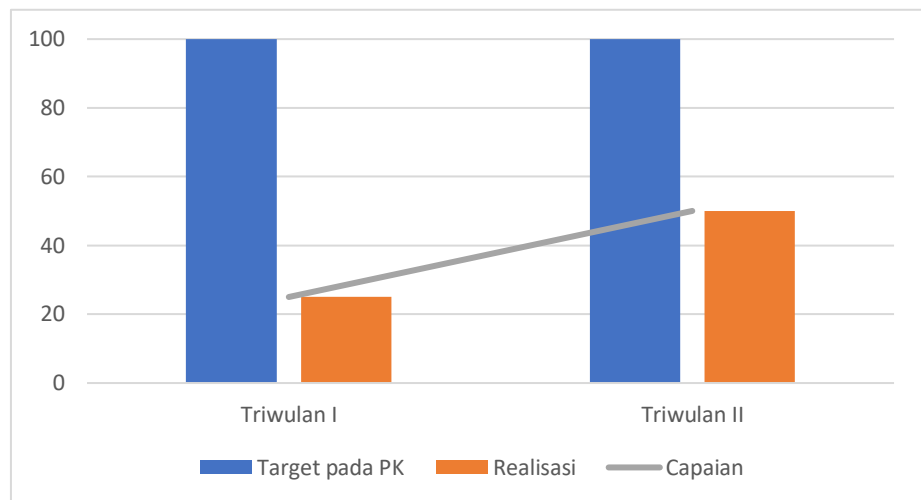
Keterangan:

Trayek yang dilayani adalah:

- a. Senyerang – Teluk Nilau – Kuala Tungkal;
- b. Desa Tanah Tumbuh – Sp. Niam – Terminal Muara Bulian;
- c. Desa Bangun Seranten – Terminal Bungo;
- d. Desa Batu Kerbau – Terminal Tipe A Muara Bungo;
- e. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
- f. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
- g. Desa Sentano – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
- h. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 sebesar 50,04% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 50,04%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dibawah ini :



Gambar II.1 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 1

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas;



c. Faktor-faktor kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

- Tidak tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1248}{2494} \times 100\% = 50,04\%$$

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 50,04%.

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun realisasi anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 4.985.836.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.125.852.574,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan subsidi angkutan perintis di Provinsi Jambi;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pembukaan rute angkutan perintis yang baru;
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang belum memadai.

2.2.1.2. IKK 2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

2.2.1.3. IKK 3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

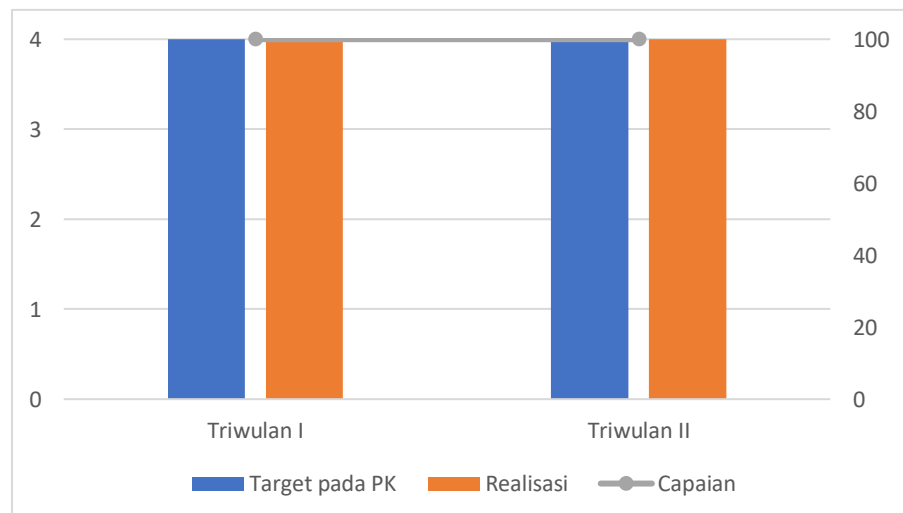
Terminal Tipe-A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di Jalan.

Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyelenggaraan kelancaran operasional Terminal Tipe A dan memastikan tata Kelola sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif. Terminal Tipe A yang beroperasi di Provinsi Jambi ada 4 Terminal diantaranya adalah:

- a. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
- b. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
- c. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
- d. Terminal Tipe A Muara Bungo.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2022 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.2 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 3

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;
- Tersedianya anggaran operasional;
- Tersedianya sarana dan prasarana.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Capaian Jumlah pelaksanaan Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian presentase pelaksanaan Terminal Tipe A dan Terminal Barang berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 9.174.025.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.996.312.916,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan.

2.2.1.4. IKK 4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 202

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

2.2.1.5. IKK 5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 202

Tidak ada kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan pada Tahun 2023.

2.2.1.6. IKK 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan Sungai, Danau, Waduk, dan Terusan. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang Beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Pelabuhan Pelabuhan SDP yang beroperasi saat ini berjumlah 6 pelabuhan, adapun rincian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yaitu:

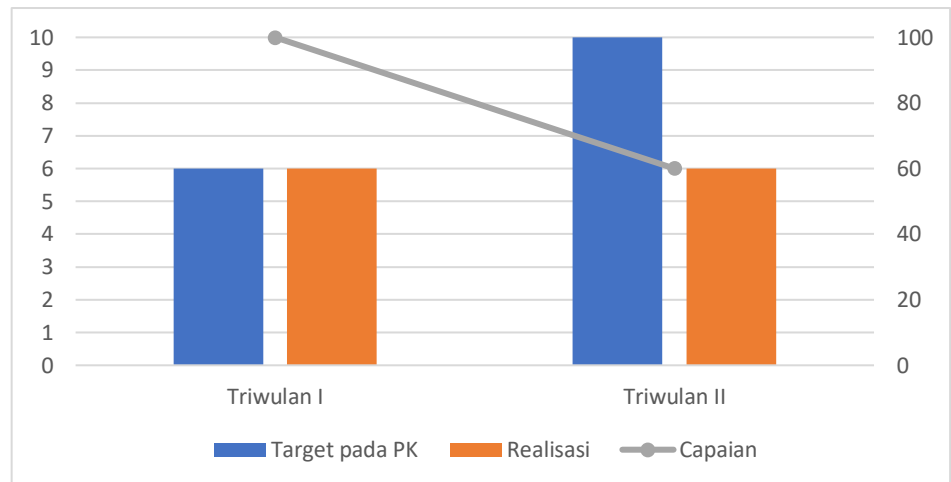
- Pelabuhan sungai penyeberangan kuala tungkal (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Sarolangun (Tidak Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Kuala Jambi (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Nipah Panjang (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Muara Sabak (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Angso duo (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Jambi (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Muara Bulian (Tidak Beroperasi).

Pada IKK tersebut terdapat pembangunan 4 (empat) Halte Sungai pada tahun ini. 4 (empat) Halte sungai tersebut adalah :

1. Pembangunan Halte sungai Teluk majelis Kec. Kuala jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
2. Pembangunan Halte sungai Makam Orang Kayo Hitam Kab. Tanjung Jabung Timur;
3. Pembangunan Halte sungai Desa Lumahan Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat;
4. Pembangunan Halte sungai Dusun Tanjung mawar desa kayu aro kecamatan senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 6 Lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 6 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.4 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 6

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran;
- Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
- Pengawasan operasional Pelabuhan.



c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Minimnya pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
- Tidak optimalnya pengawasan operasional pelabuhan.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{6}{10} \times 100\% = 60\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Indikator Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu :

1. Operasional Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebesar Rp. 586.515.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 173.522.000,-.
2. Pembangunan Halte sungai sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.774.924.140,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun.

2.2.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu balai di bawah direktorat jenderal perhubungan darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya kinerja pelayanan transportasi darat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A;
2. IKK 8. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A;
3. IKK 9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

2.2.2.1. IKK 7 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

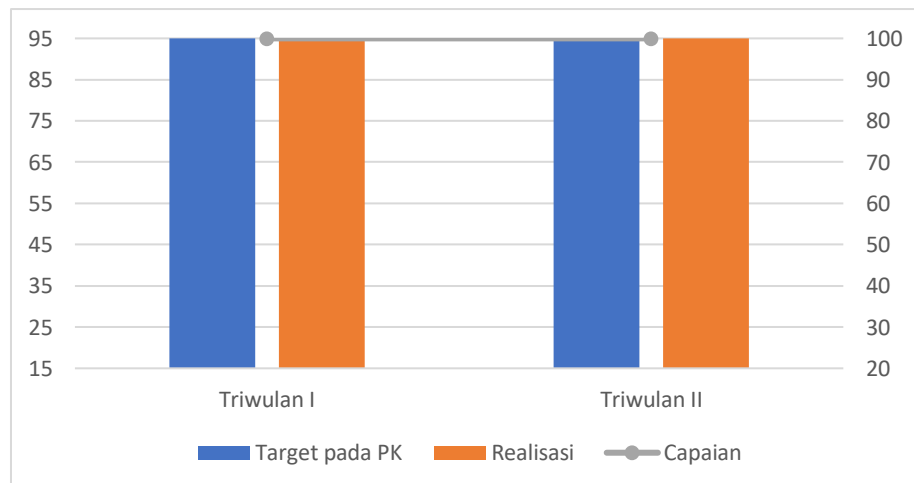
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6)

pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Capaian kinerja pada indikator Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A ini mencapai sebesar 95% dan terdapat 4 TTA di Provinsi Jambi yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan ketentuan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 95% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 95%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.5 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 7

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;
- Tersedianya anggaran operasional;
- Tersedianya sarana dan prasarana.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

d. Rumus Capaian:

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95}{95} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 105.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 39.312.364,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan.



2.2.2.2. IKK 8 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

2.2.2.3. IKK 9 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

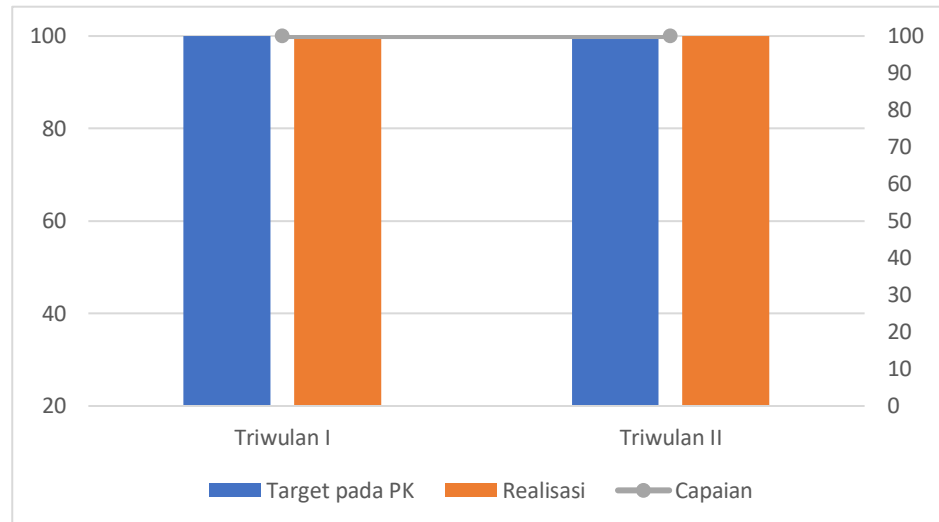
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Pelabuhan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Capaian kinerja pada indikator Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP tercapai sebesar 100%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.6 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 9

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :



- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Kualitas SDM;
- Pelaksanaan pengawasan secara periodik.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana tidak memadai
- Kurangnya SDM;
- Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal sudah dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan dari Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-. Adapun realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 24.099.000,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

2.2.3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya keselamatan transportasi.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass, dan batas kecepatan;
4. IKK 13. Jumlah ketersediaan taman edukatif;
5. IKK 14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
6. IKK 15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE);
7. IKK 16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. IKK 17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP.

2.2.3.1. IKK 10 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1) Definisi Indikator Kinerja

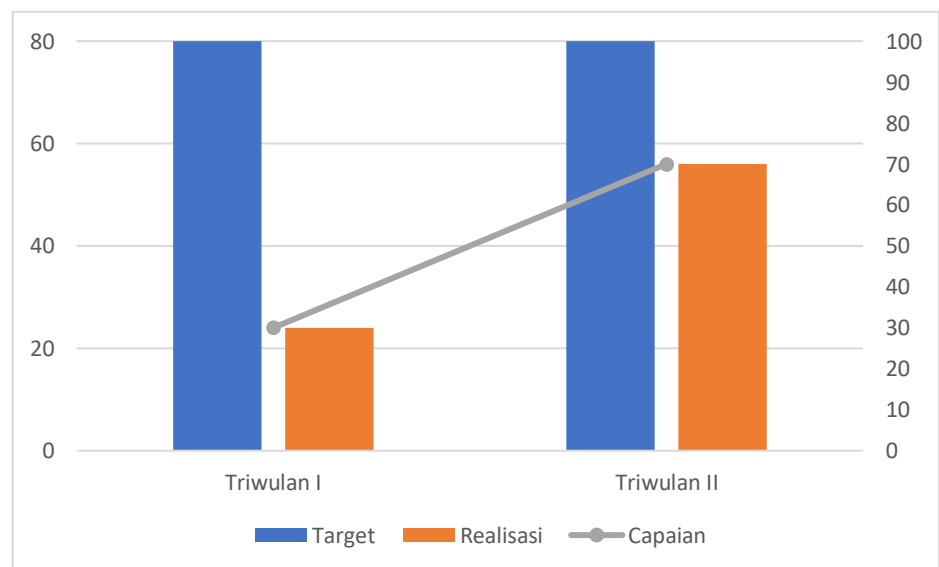
Pada indikator Kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terdapat beberapa kegiatan yaitu :

- Perlengkapan jalan;
- Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK);
- Pemeliharaan perlengkapan jalan;
- Perlengkapan jalan (Prioritas Nasional);
- Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan.

Capaian kinerja pada indikator persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 70%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023 sebesar 56% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 70%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.7 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 10



a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{56}{80} \times 100\% = 70\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu :

1. Pagu anggaran Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 6.420.200.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.487.426.000,-.

2. Pagu anggaran Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 593.426.000,-.
3. Pagu anggaran Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 700.300.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0.
4. Pagu anggaran Perlengkapan Jalan (Prioritas nasional) sebesar Rp. 15.203.016.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 11.402.843.400,-.
5. Pagu anggaran Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 4.920.200.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 894.000.000,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

2.2.3.2. IKK 11 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

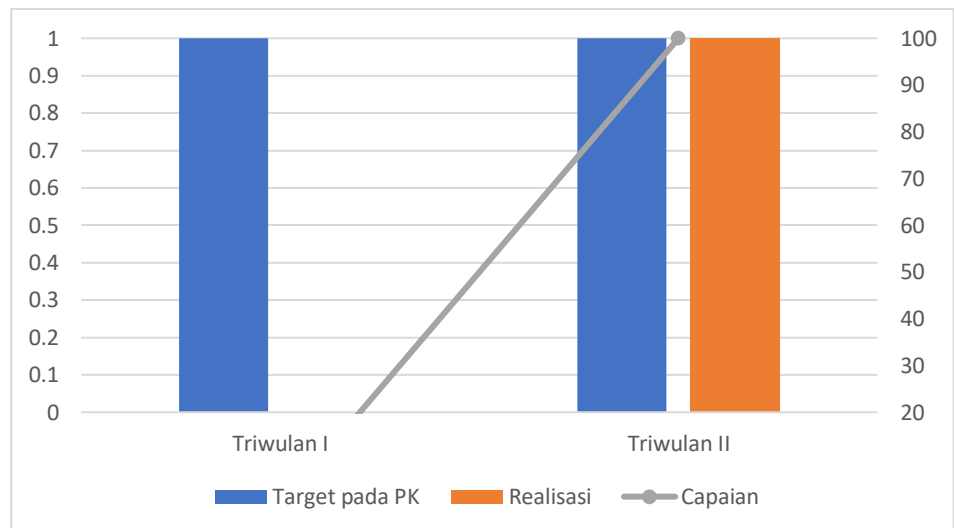
Pada IKK tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan

menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran Over Dimensi dan Over Load.

Capaian kinerja pada indikator persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini sebesar 1%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 sebesar 0,25% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1%, maka capaian kinerja mencapai 0,25%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar III.17 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 11

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

**b. Faktor-faktor Keberhasilan :**

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

- Patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
- SDM yang cukup;
- Sarana dan prasarana yang memadai.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

- Tidak patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
- Kurangnya SDM;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu :

1. Pagu anggaran Operasional UPPKB sebesar Rp. 4.990.735.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.665.294.383;
2. Pagu anggaran Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan Sarolangun Jambi sebesar Rp. 19.181.990.000 dengan Triwulan II sebesar Rp. 8.551.030.345.

**a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang;
2. Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan Over Dimensi Over Load (ODOL);
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

2.2.3.3 IKK 12 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

2.2.3.4 IKK 13 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif Tahun 2023.

2.2.3.5 IKK 14 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

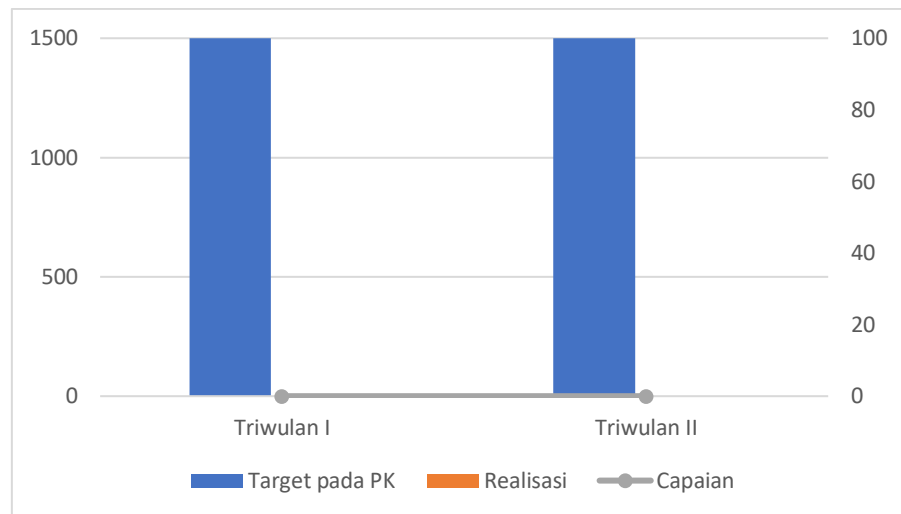
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat.

Kegiatan pada IKK tersebut untuk mengkampanyekan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 sebesar 0 orang dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1.500 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.9 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 14

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
- Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1500} \times 100\% = 0\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan edukasi kesadaran tertib berlalu lintas;
2. Melakukan pemeliharaan terhadap ZoSS yang terpasang;
3. Melakukan koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas.

2.2.3.5 IKK 15 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) pada Tahun 2023.



a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) Tahun 2023.

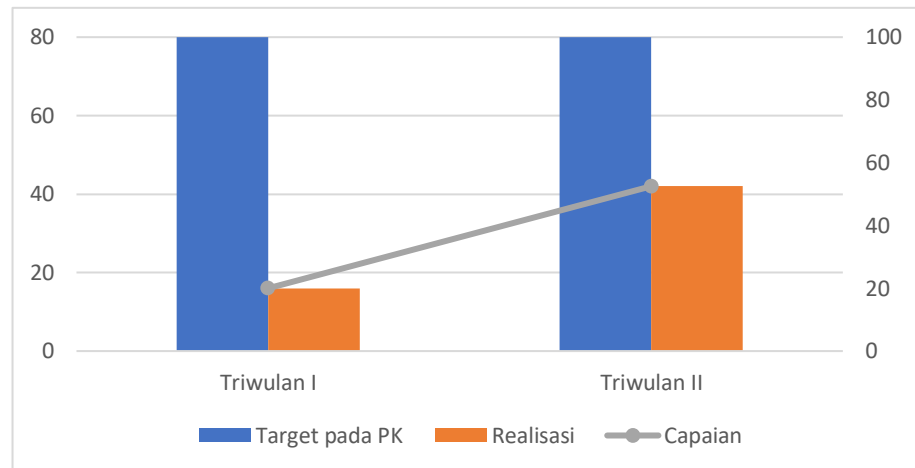
2.2.3.6 IKK 16 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023 sebesar 42%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 52,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.10 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 16

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

- Adanya anggaran;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kompetensi.

**c. Faktor-faktor Kegagalan :**

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{42}{80} \times 100\% = 52,5\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan fisik rancang bangun perusahaan karoseri sebesar Rp. 105.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 52.291.428,-.
2. Kegiatan Pelaksanaan kalibrasi alat uji UPUBKB Rp. 110.000.000, Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 19.712.000,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai.

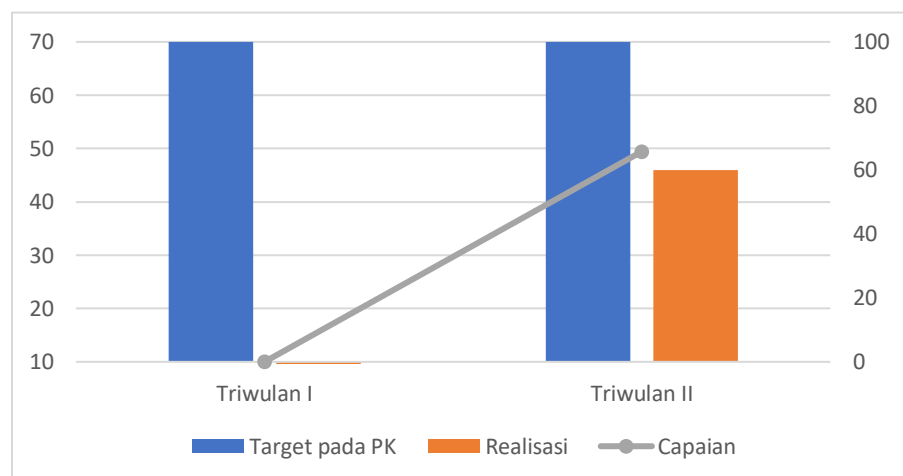
2.2.3.7 IKK 17 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran sungai dan danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023 sebesar 65,71%, jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Tahun 2023 sebesar 70 Unit, maka capaian kinerja mencapai 65,71%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.11 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 17

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;

- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 –2024.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas rambu sungai yang rusak;
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

2.2.4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

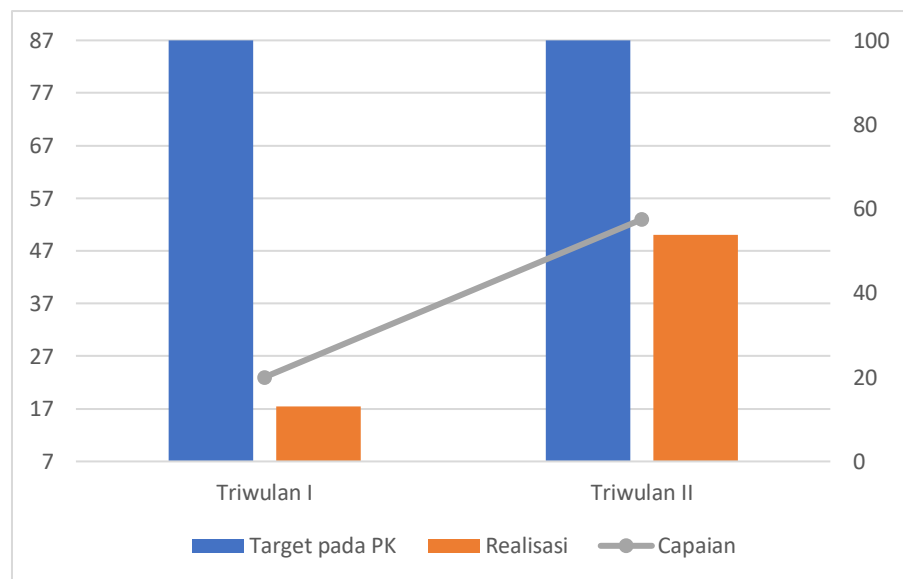
2.2.4.1. IKK 18 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 57,47%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 sebesar 50%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 87%, maka capaian kinerja mencapai 57,47%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.12 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 18

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 –2024.



b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

- SDM yang cukup dan berkualitas;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Tersedianya anggaran

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{50}{87} \times 100\% = 57,4\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 3.748.720.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 917.329.631,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Jambi secara optimal;
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

2.2.5. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel

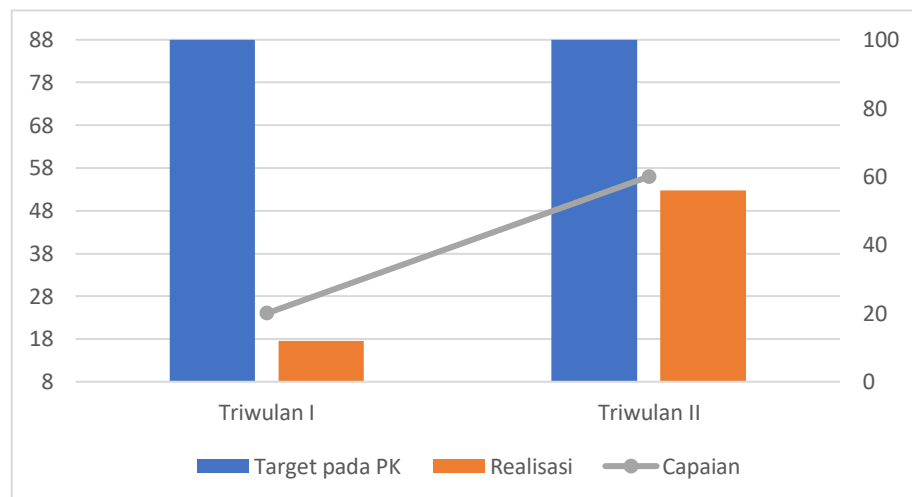
2.2.5.1. IKK 19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 60%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II sebesar 52,8%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 88%, maka capaian kinerja mencapai 60%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar III.25 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 19

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;



- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya anggaran

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{52,8}{88} \times 100\% = 60\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu:

1. Pagu anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp. 5.902.143.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.894.679.521,-.
2. Pagu anggaran pengadaan perangkat pengelola data dan informasi sebesar Rp. 173.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 130.600.000,-.
3. Pagu anggaran pengadaan belanja modal lainnya sebesar Rp. 410.680.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 151.189.189,-.



4. Pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 17.633.587.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 10.504.836.385,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan II

Pagu Per Triwulan II DIPA TA. 2023 sebesar Rp. 101.642.747.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2 Rincian per Sumber Dana pagu Tahun 2023 per triwulan II

Sumber Dana	Pagu
RM	80.623.757.000
PNBP	1.837.000.000
SBSN	19.181.990.000
Total	101.642.747.000

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan II

Tabel II.3 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2023 per Triwulan II

Jenis Belanja	Pagu
Belanja Pegawai	17.633.587.000
Belanja Barang	47.895.203.000
Belanja Modal	36.113.957.000
Total	101.642.747.000

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :



1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000.
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 27 Desember 2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000. Terdapat *Automatic Adjustment* pada Belanja Pegawai (Tunjangan khusus / kegiatan / kinerja sebesar Rp. 2.462.697.000.
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 12 April 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.642.747.000. Pada Revisi tersebut ada penambahan anggaran Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBSN yang tidak terserap pada Tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan sebesar Rp. 281.990.000.
4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 17 April 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.642.747.000.

2. Refocusing Anggaran Tahun 2023

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan II

Pada Revisi ke-1 DIPA terdapat *Automatic Adjustment* pada Sumber Dana Rupiah Murni sebesar Rp. 2.462.697.000.

Tabel II.4 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan II

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	80.623.757.000	1.837.000.000	18.900.000.000	101.360.757.000
Revisi Ke-1	80.623.757.000	1.837.000.000	18.900.000.000	101.360.757.000
Revisi Ke-2	80.623.757.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.642.747.000
Revisi Ke-3	80.623.757.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.642.747.000

b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan II

Pada Revisi ke-1 DIPA terdapat *Automatic Adjustment* pada Jenis Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.462.697.000.

Tabel II.5 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan II

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu Awal	17.633.587.000	47.895.203.000	35.831.967.000	101.360.757.000
Revisi Ke-1	17.633.587.000	47.895.203.000	35.831.967.000	101.360.757.000
Revisi Ke-2	17.633.587.000	47.895.203.000	36.113.957.000	101.642.747.000
Revisi Ke-3	17.633.587.000	47.895.203.000	36.113.957.000	101.642.747.000

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan II

Sampai dengan Triwulan II ada penambahan anggaran Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBSN yang tidak terserap pada Tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan sebesar Rp. 281.990.000.

Tabel II.6 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja
Tahun 2023 per Triwulan II

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Per Triwulan I	Perubahan	Pagu Per Triwulan II
Belanja Pegawai	17.633.587.000	-	17.633.587.000	-	17.633.587.000
RM	17.633.587.000	-	17.633.587.000	-	17.633.587.000
PNBP	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-
Belanja Barang	47.895.203.000	-	47.895.203.000	-	47.895.203.000
RM	47.895.203.000	-	47.895.203.000	-	47.895.203.000
PNBP	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-
Belanja Modal	35.831.967.000	-	35.831.967.000	281.990.000	36.113.957.000
RM	15.094.967.000	-	15.094.967.000	-	15.094.967.000
PNBP	1.837.000.000	-	1.837.000.000	-	1.837.000.000
SBSN	18.900.000.000	-	18.900.000.000	281.990.000	19.181.990.000

**d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan
Tahun 2023 per Triwulan II**

Sampai dengan Triwulan II ada penambahan anggaran Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBSN yang tidak terserap pada Tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan sebesar Rp. 281.990.000.



Tabel II.7 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan
Tahun 2023 per Triwulan II

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.241.347.000	-	77.241.347.000	281.990.000	77.523.337.000
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	14.985.836.000	-	14.985.836.000	-	14.985.836.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.760.540.000	-	9.760.540.000	-	9.760.540.000
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.351.251.000	-	48.351.251.000	281.990.000	48.633.241.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	-	4.143.720.000	-	4.143.720.000
WA	Program Dukungan Manajemen	24.119.410.000	-	24.119.410.000	-	24.119.410.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	583.680.000	-	583.680.000	-	583.680.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.902.143.000	-	5.902.143.000	-	5.902.143.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	-	17.633.587.000	-	17.633.587.000

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2023

Berikut adalah rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2023 sampai dengan Triwulan II :

Tabel II.8 Rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2023 sampai dengan Triwulan II

No.	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	%
1.	2020	88.949.535.000	88.649.535.000	34.656.635.261	39,09
2.	2021	129.371.473.000	97.826.002.000	38.486.821.766	39,34
3.	2022	65.786.704.000	61.406.971.000	24.036.621.628	39,14
4.	2023	101.360.757.000	101.642.747.000	44.895.523.029	44,17

II.3.2. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2023

Berikut adalah rincian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 per Triwulan II

Tabel II.9 Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA TA. 2023 per Triwulan II

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.241.347.000	77.241.347.000	10.158.486.437	13,15	77.523.337.000	31.911.640.171	41,16
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	14.985.836.000	14.985.836.000	1.124.644.587	7,50	14.985.836.000	4.900.776.714	32,70
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.760.540.000	9.760.540.000	1.562.182.257	16,01	9.760.540.000	2.772.008.506	28,40



GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.351.251.000	48.351.251.000	7.206.845.478	14,91	48.633.241.000	23.186.110.528	47,68
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	4.143.720.000	264.814.115	6,39	4.143.720.000	1.052.744.423	25,41
WA	Program Dukungan Manajemen	24.119.410.000	24.119.410.000	8.169.756.660	33,87	24.119.410.000	12.983.882.858	53,83
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	583.680.000	583.680.000	243.100.000	41,65	583.680.000	281.789.189	48,28
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.902.143.000	5.902.143.000	1.716.975.199	29,09	5.902.143.000	2.805.344.461	47,53
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	17.633.587.000	6.209.681.461	35,22	17.633.587.000	9.896.749.208	56,12

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan II

Tabel II.10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan II

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
Belanja Pegawai	17.633.587.000	9.896.749.208	56,12
Belanja Barang	47.895.203.000	15.731.008.487	32,84
Belanja Modal	36.113.957.000	19.267.765.334	53,35
Total	101.642.747.000	44.895.523.029	44,17

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan II

Tabel II.11 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
RM	80.623.757.000	36.044.280.284	44,71
PNBP	1.837.000.000	300.212.400	16,34
SBSN	19.181.990.000	8.551.030.345	44,58
Total	101.642.747.000	44.895.523.029	44,17



4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Untuk analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja untuk Triwulan II TA. 2023 belum dapat analisa dikarenakan anggaran terkait dengan biaya untuk pelaksanaan kegiatan sehingga manfaat/kinerja dapat terlaksana.

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk Triwulan II TA. 2023 belum dapat analisa dikarenakan anggaran terkait dengan biaya untuk pelaksanaan kegiatan sehingga manfaat/kinerja dapat terlaksana.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

Berikut uraian atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

**Tabel II.12** Tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

USULAN PERUBAHAN JABATAN FUNGSIONAL BPTD WILAYAH V PROVINSI JAMBI					
SEMULA					
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA					
HARWINANTO, SE, MT					
NIP. 19730313 199303 1 005					
Jabatan	Nama/NIP	Kls	B	K	
Analisis Kepegawaian Penyelia	-	8	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	-	7	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana	-	6	0	1	
Penyusun Rencana dan Pelaporan	Pande Gede. S, S.Kom. M.si. 19820110 200212 1 003	7	1	1	
Peneleah Kehumasan dan Publikasi	-	7	0	2	
Pengelola Ketatausahaan	Windu Suroso, A.Md 19750211 199803 1 002	7	1	2	
Pengelola Kepegawaian	1. Rilke, S.E 19730427 199803 2 001	7	2	3	
	2. Winda Retno Sari 19960427 201503 2001				
Pengelola Urusan Kerumahtanggaan	1. MJ Mulyono, Amd 19741004 200604 1 001	7	2	2	
	2. Timbul Jelly Sihalohe, SE, MM 19771126 200604 1 002				
Pengelola Keuangan	1. Rio Leismana Rafar, ST, MM 19790403 201001 1 008	7	2	5	
	2. Andrianus Kopong, A.Md 19880408 201503 1004				
Pengelola Data dan Sistem Informasi	M. Sidik Pramono, A.Md 19850812 201001 1 014	6	1	2	
Pengadministrasi Umum	Magdalena Golang Gabelen 19770818 200801 2 004	5	1	2	
JUMLAH		10	22		
PERUBAHAN					
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA					
HARWINANTO, SE, MT					
NIP. 19730313 199303 1 005					
Jabatan	Nama/NIP	Kls	B	K	
Analisis Kepegawaian Penyelia	-	8	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	-	7	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana	-	6	0	1	
Penyusun Rencana dan Pelaporan	Pande Gede. S, S.Kom. M.si. 19820110 200212 1 003	7	1	1	
Peneleah Kehumasan dan Publikasi	-	7	0	2	
Pengelola Ketatausahaan	Windu Suroso, A.Md 19750211 199803 1 002	7	1	2	
Pengelola Kepegawaian	Rilke, S.E 19730427 199803 2 001	7	2	3	
	Magdalena Golang Gabelen 19770818 200801 2 004				
Pengelola Urusan Kerumahtanggaan	1. Timbul Jelly Sihalohe, SE, MM 19771126 200604 1 002	7	2	2	
	2. M. Sidik Pramono, A.Md 19850812 201001 1 014				
Pengelola Keuangan	1. Rio Leismana Rafar, ST, MM 19790403 201001 1 008	7	4	5	
	2. MJ Mulyono, Amd 19741004 200604 1 001				
	3. Agus Prihanto, A.Md 19750826 199803 1 001				
	4. Andrianus Kopong, A.Md 19880408 201503 1004				
Pengelola Data dan Sistem Informasi	-	6	0	2	
Pengadministrasi Umum	-	5	0	2	
JUMLAH		10	22		

Jambi, Maret 2022
Kepala BPTD Wilayah V
Provinsi Jambi

Bahar, ST, MT
NIP. 19711007 199803 1 008



3. Hambatan dan Kendala

Untuk periode Triwulan II Tahun 2023 tidak ada hambatan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik yang bersifat kontraktual maupun rutin.



BAB III

Penutup

BAB III

PENUTUP

III.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ini terdapat 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan II Tahun 2023. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 50,04% (target 100%);
 - 2) Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - 3) Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 4) Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - 5) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - 6) Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 6 lokasi (target 10 lokasi);
 - 7) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 95% (target 95%);
 - 8) Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - 9) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 100% (target 100%);
 - 10) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 70% (target 80%);



- 11) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 1% (target 1%)
 - 12) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional tidak ada realisasi dan target dalam indikator kerja tersebut;
 - 13) Jumlah ketersediaan taman edukasi tidak ada realisasi dan target dalam indikator kerja tersebut;
 - 14) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 orang (target 1.500 orang);
 - 15) Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) tidak ada realisasi dan target dalam indikator kerja tersebut;
 - 16) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 52,5% (target 80%);
 - 17) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran terealisasi 65,71% (target 70%)
 - 18) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 50 (target 87);
 - 19) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 61,6 (target 88).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.13 hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam Revisi I PK	TRIWULAN II			Evaluasi	Tindakanjnt	Penanggung Jawab
					Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	Persen	100	100	50,04	50,04	Belum Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan subsidi angkutan perintis di Provinsi Jambi. 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pembukaan rute angkutan perintis yang baru.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-	-
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	4	4	4	100	Tercapai	1) Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang; 2) Meningkatkan fasilitas para penumpang; 3) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap keselamatan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan



								transportasi jalan.	
		4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	0	0	0	0	Tercapai	1) Meningkatkan pengawasan Standar Pelayanan Minimal terhadap fasilitas Dermaga Pelabuhan dan Kapal Penyeberanga; 2) Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang; 3) Meningkatkan pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan.
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	10	10	6	60	Belum Tercapai	Seksi Lalu Lintas Jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan pengawasan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan



2.	Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	95	95	95	100	Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Jambi; 2) Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan jalan terkait SPM pelayanan angkutan jalan; 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan jalan yang melanggar ketentuan yang ada.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-	-	-	100	Tercapai	-	-
		9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100	100	100	100	Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi; 2) Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan; 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	80	80	56	70	Belum Tercapai	1) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan	Seksi Lalu Lintas Jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan pengawasan

								jalan yang rusak; 2) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga faslitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	
	11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	1	1	1	100	Tercapai	1) Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masy arakat terkait maximum Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang; 2) Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan ODOL.	Seksi Lalu Lintas Jalan, sungai, danau, penyeberangan , dan pengawasan
	12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-	-
	13. Jumlah ketersediaan taman edukasi	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-	-
	14. Jumlah masyarakat yang tesosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	0	0	Belum Tercapai	1) Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas di Sekolah- Sekolah dan kampus serta komunitas. 2) Melaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Transportasi Jalan.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
	15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar	Unit	0	0	0	100	Tercapai	-	-



		internasional (UN-ECE)								
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	80	80	42	52,5	Belum Tercapai	1) Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; 2) Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	70	70	46	65,71	Belum Tercapai	1) Melakukan pembangunan terhadap fasilitas rambu sungai; 2) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas rambu sungai.	Seksi Lalu Lintas Jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan pengawasan
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	87	50	57,47	Belum Tercapai	Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Jambi secara optimal.	Subbag TU
5.	Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat	Nilai	88	88	61,6	70	Belum Tercapai	Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Kelas II Jambi.	Subbag TU



Lampiran



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

JAMBI, JANUARI 2023

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0

		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

Jambi, Januari 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

Sigit MIntarso

NIP. 19680130 199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

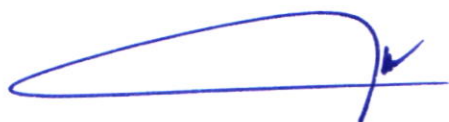
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 14.985.836.000 |
| 2. | Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 9.760.540.000 |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 48.351.251.000 |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 4.143.720.000 |
| 5. | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp. 583.680.000 |
| 6. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 5.902.143.000 |
| 7. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 17.633.587.000 |

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2023

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO

NIP. 19680130 199003 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	10
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	14.985.836.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	48.633.241.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.902.143.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	17.633.587.000

ANGGARAN

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Mei 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

[illegible]

[illegible]

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pengadaan alat kalibrasi uji berkala kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	787,000,000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	200	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (70 unit) termasuk supervisi	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	1,050,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengiriman Diklat Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Subbag Tata Usaha
					3. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	200,000,000	Subbag Tata Usaha
					4. Sosialisasi Dasar-dasar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Bagi SDM Perhubungan di Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	171,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					5. Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	110,000,000	Subbag Tata Usaha
					6. Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH, dan Profil BPTD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	125,000,000	Subbag Tata Usaha
					7. Koordinasi Kelembagaan Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	Subbag Tata Usaha
					8. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	380,000,000	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan dan Penyeberangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan											Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
					10. Monitoring dan Pemantauan Fasilitas Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					11. Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Sungai, Danau dan Penyeberangan (Ramp Check)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					12. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					13. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					14. Monitoring dan Evaluasi Andalalin pada Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					15. Monitoring dan Pembahasan Andalalin pada Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					16. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan Terminal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
					17. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan UPPKB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	57.720.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					18. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	110.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					19. Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					20. Biaya Penyidikan dan Pendampingan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					21. Monitoring dan Pembinaan SMK serta SPM Penyelenggaraan Angkutan Umum AKAP dan AJAP di Provinsi Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	65.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					22. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					23. <i>Inhouse Consultant</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88	1. Operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.902.143.000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengadaan perangkat Pengelola Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.000.000	Subbag Tata Usaha
					3. Pengadaan Belanja Modal Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	410.680.000	Subbag Tata Usaha
					4. Belanja gaji dan tunjangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17.633.587.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, Januari 2023
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi


Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001

**MONITORING RENCANA AKSI
BULAN JUNI TAHUN 2023
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM	SATUAN TARGER KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
						volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Subsidi operasional angkutan jalan	100	%	100	100%	4.985.836.000	100%	48,84	Rp 2.125.852.574	49%	43%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring secara rutin dan berkala	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Jumlah Simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	-
		Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	Lokasi	4	100%	9.174.025.000	100%	4	Rp 2.860.022.216	100%	31%	Tercapai	- Penambahan SDM - Peningkatan sarana dan prasarana seperti toilet, ruang tunggu, dan penerangan	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	-
		Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	-
		Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pelabuhan SDP yang Beroperasi	6	Lokasi	10	100%	586.515.000	100%	6	Rp 173.522.000	65%	28%	Belum Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Perintis
			Pembangunan Halte Sungai	4				10.000.000.000		0	Rp 2.774.924.140					
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan Terminal	95	%	95	100%	105.000.000	100%	95	Rp 39.312.364	100%	37%	Tercapai	Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Jambi	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	-

		Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring dan Pemantauan Fasilitas Prasarana Transportasi SDP di Provinsi Jambi	100	%	100	100%	75.000.000	100%	100	Rp 24.099.000	100%	32%	Tercapai	Akan dilaksanakannya monitoring dan pengawasan terkait pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP sehingga pelayanan kepada Pengunjung dapat optimal	Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Perintis
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Jalan	80	%	80	100%	6.420.200.000	100%	45	Rp 1.487.426.000	56%	50%	Belum Tercapai	Kegiatan yang ada pada IKK tersebut dalam Proses Pekerjaan	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
			Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)					1.500.000.000			Rp 593.426.000					
			Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					700.300.000			Rp -					
			Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)					15.203.016.000			Rp 11.402.843.400					
			Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan					4.920.200.000			Rp 894.000.000					
		Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat		1	%	1	1%	4.990.735.000	100%	0,33	Rp 1.565.594.383	0,33%	31%	Belum Tercapai	Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan ODOL	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	-
		Jumlah ketersediaan taman edukatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	-
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1500	Orang	1500	100%	300.000.000	100%	0	Rp -	0%	0%	Belum Tercapai	Melaksanakan sosialisasi keselamatan transportasi jalan	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standard internasional (UN-ECE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	Tidak ada target pada IKK tersebut pada tahun ini	-
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	80	%	80	100%	105.000.000	100%	40	Rp 52.291.428	50%	33%	Belum Tercapai	Meningkatkan SDM Penguji kendaraan bermotor	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
			Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB					110.000.000			Rp 19.712.000					
		Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Sungai Batanghari (70 unit) termasuk Supervisi	70	Unit	70	100%	1.050.000.000	100%	46	Rp 300.212.400	66%	29%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring dan pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut	Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Perintis
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	87	%	87	100%	100.000.000	100%	44	Rp 100.000.000	50%	24%	Belum Tercapai	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan timeline yang sudah direncanakan	Kepala Subbag Tata Usaha
			Pengiriman Diklat Pegawai					100.000.000			Rp 100.000.000					
			Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi					200.000.000			Rp -					

			Inhouse Consultant					200.000.000	100%		Rp	-					
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	88	%	88	100%	5.902.143.000	100%	44	Rp	2.894.679.521	50%	57%	Belum Tercapai	Melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada	Kepala Subbag Tata Usaha
			Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Informasi					173.000.000	100%		Rp	130.600.000					
			Pengadaan Belanja Modal Lainnya					410.680.000	100%		Rp	151.189.189					
			Belanja Gaji dan Tunjangan					17.633.587.000	100%		Rp	10.504.836.385					



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia